

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual diberitakan dalam media massa dengan sudut pandang yang menyalahkan korban. Pemberitaan kekerasan terhadap perempuan yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) mengarah pada sadisme seksual. Penyebaran informasi pemerkosaan menjadi vulgar dengan dramatisasi situasi yang justru menyudutkan dan membuat malu korban. Banyak pemberitaan di media massa menggiring masyarakat untuk lebih menyalahkan korban pemerkosaan dan berempati pada pelaku yang berdalih tak mampu menahan gairah seksualnya. Pemilihan diksi pemberitaan juga seringkali merepresentasikan posisi korban sebagai orang yang lemah dan tak kuasa atas dirinya sendiri. Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual di kampus, kira-kira hanya 1 dari 10 laporan yang berhasil mendapat perhatian dan pelaku dikenakan sanksi. Ikhaputri (dalam Karnindita, 2017) mengemukakan data dari Lentera Sintas yang mengungkapkan 93% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan ke tingkat hukum dan hanya 1% yang berhasil dituntaskan lewat proses pengadilan.

Media di Indonesia belum bisa lepas dari cara berpikir masyarakat yang patriarkis. Media masih berpikir bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik. Sedangkan perempuan yang sering pulang malam adalah gambaran perempuan yang tidak baik.

Pemilihan kalimat dalam pemberitaan media yang seksis juga masih banyak ditemui dalam berita. Kalimat yang tidak ramah seperti ‘menggagahi’, ‘menelanjangi’ banyak ditemukan untuk menggantikan kosakata memerkosa. Tak hanya itu, perempuan juga digambarkan sebagai orang yang ternoda atau kehilangan kehormatannya.

Berita dengan judul kontroversial juga banyak ditulis oleh media online sekarang. Judul ini mencerminkan berita yang tidak sensitif terhadap perasaan korban dan nilai keadilan. “Mengharukan, Pemeriksa Nikahi Korbannya di Masjid Polres”, atau “Ayah Garap Anak Tiri” adalah beberapa dari sekian contoh berita. Korban pun seringkali dijadikan sebagai korban kembali dalam pemberitaan (*revictimization*). Berita ditampilkan dengan mengekspos imajinasi seksual untuk menaikkan syahwat maupun empati pembaca dan mengobjektifikasi korban. Meskipun media memiliki niat baik untuk menumbuhkan empati, namun kesan empati malah tidak muncul untuk korban sendiri. Bahkan, berita tersebut akan cenderung mewajarkan perlakuan yang diterima korban karena korban pun dinilai menyetujui atau menjadi pemicu dari adanya pemerkosaan.

Korban juga sering divisualisasikan menggunakan penyebutan pakaian dan ciri fisik yang melekat dalam diri korban. Seringkali publik juga berpandangan bahwa korban kekerasan seksual mengalami perlakuan tersebut dikarenakan kesalahannya sendiri. Bahkan stigma “bukan perempuan baik-baik” dan “menikmati kekerasan seksual pada dirinya” juga disematkan pada korban.

Dalam praktik pers pun kita tidak sadar bahwa berbagai pelaporan dalam berita terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan perempuan. Niat

baik pers mungkin dapat dideteksi dengan nurani, namun ketika menuliskan pelaporan berita tersebut, ternyata didapati ungkapan dan pilihan yang dapat merendahkan perempuan. Ungkapan dan pilihan yang mendelegitimasi perempuan itu terlestarikan citranya lewat tulisan, film, lagu pop, acara-acara yang diekspos oleh media, termasuk dalam hal ini adalah berita kekerasan seksual.

Realitanya, media sering tidak patuh terhadap rambu-rambu dalam pemberitaan kekerasan seksual. Sebagaimana hasil penelitian Komnas Perempuan terhadap konten berita di media cetak terbitan Januari-Juni 2015. Di Kompas misalnya. Dari 11 berita soal kekerasan seksual, ada 4 berita yang mengungkapkan identitas korban dan 1 berita yang mencampuradukkan fakta dan opini. Kemudian ada 1 berita yang mengandung informasi cabul dan sadis.

Dalam urusan pemenuhan hak korban, Pos Kota yang menempati posisi terendah. Pos Kota, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 229 berita yang dikliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 69 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 69 pemberitaan kekerasan seksual terdapat 7 pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban. Pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban tersebut menggunakan diksi yang bias (69,5%), 24 berita melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (34,7%), 19 berita menggunakan narsum yang bias (27,5%), 17 berita mengungkap identitas korban (24,63%), Dari presentase tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan korban dalam berita di Pos Kota yang notabene dianggap sebagai 'koran kuning' menemui keprihatinan. Jika fenomena berita yang tidak memenuhi hak korban ini diterapkan juga dalam keredaksian pers yang lebih

professional dan lebih representatif untuk sebuah institusi sekelas universitas, pengertian nilai moral dan kebebasan pers harus kita maknai kembali (Komnas Perempuan, 2019 : 35)

Perkosaan mendapat tempat dalam penyuguhan berita sehari-hari. Bahkan ketika diberitakan secara sensasional, dengan mudah berita tersebut akan menjadi topik perbincangan dan muncul di halaman depan. Mirisnya, dampak dari pemberitaan pemerkosaan ini adalah munculnya *common sense* sekitar perkosaan. Dalam Hal ini, perempuan dalam berita pemerkosaan masih digambarkan sebagai objek yang memiliki sifat dan peran dalam *Traditional Gender Roles*. Traditional Gender Roles biasa dikonseptualisasikan bahwa wanita harus memprioritaskan tanggungjawab keluarga dan pria untuk tanggungjawab kerja (Makela & Suutari, 2015 : 78).

Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan Ikhsanti (2016 : 12) dalam penelitiannya, hal ini bisa memunculkan mitos yang hingga kini masih dipercaya di masyarakat. Mitos yang sering muncul adalah pria berhak mengambil suatu keputusan, sedangkan perempuan tidak berdaya di hadapan keputusan yang diambil sang pria. Mitos ini dapat dibuktikan melalui beberapa kosakata yang akhirnya digunakan oleh media untuk memberitakan berita kekerasan seksual, seperti menggauli, menodai, mencabuli, maupun menggagahi. Sang pria digambarkan sebagai sosok yang aktif melakukan aktifitas tersebut, sedangkan sang wanita seringkali digambarkan sebagai sosok yang pasrah dan hanya bisa menerima perlakuan dari sang pria, seperti digauli, dinodai, dicabuli, maupun digagahi.

Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul “Analisis Teks Media” mengungkapkan hasil penelitian mengenai pemberitaan pemerkosaan yang pernah dilakukan oleh Winarko (2000 : 50). Ia meneliti mengenai pemberitaan pada surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka. Dari hasil penelitian Winarko tersebut, ditemukan 22 kata yang digunakan untuk menggantikan kata “pemukosaan”, yaitu: (1) merenggut kegadisan, (2) mencabuli, (3) menggauli, (4) menggagahi, (5) menakali, (6) dianui, (7) dikumpuli, (8) menipu luar dalam, (9) digilir, (10) dinodai, (11) digarap, (12) dihamili, (13) korban cinta paksa, (14) dipaksa berhubungan intim, (15) berbuat tidak senonoh, dan lain sebagainya. Pilihan atau pemakaian istilah tersebut jelas akan menimbulkan bias dan semakin mempermalukan korban pemerkosaan.

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih & Faturochman dalam jurnal “Buletin Psikologi” juga menyebutkan bahwa korban pemerkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan. Trauma ini dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Baik trauma yang dialami saat peristiwa terjadi maupun sesudahnya sama-sama menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Trauma yang dialami korban pun tidak bisa disamakan antara satu korban dengan korban yang lain. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, tingkat religisitas, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku dengan korban (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002: 9)

Sekarang ini justru banyak berita kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang ‘memerkosa’ korban kembali dengan mengulang kronologi kejadian secara

rinci dengan semiotika yang mengarahkan pembaca untuk membayangkan kejadiannya. Bahkan, tidak sedikit pula yang mempersalahkan korban (*blaming the victim*). Blaming the victim ini, sadar atau tidak sadar, akan berpengaruh pada kondisi traumatis korban secara langsung apabila pemaknaan yang dikonsumsi berbeda dengan pemaknaan produsen makna, terlepas dari sengaja atau tidak sengajanya kondisi ini.

Media yang berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum yang seharusnya mampu menjadi perpanjangan tangan dari suara kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil, justru malah sebaliknya. Balairung sendiri pun masih memilih kata yang tidak menggambarkan keadilan untuk memandang korban pemerkosaan.

Konsep *blaming the victim* pun muncul sebagai sudut pandang dalam merespon pemberitaan kekerasan seksual yang marak di media sosial sekarang ini. *Blaming the victim* sendiri dimaknai sebagai wujud dari kekerasan simbolik yang mengarah pada delegitimasi korban kekerasan. Dari sudut pandang gender, hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan yang tidak disadari oleh pihak media maupun korban itu sendiri. Seharusnya, kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan, hendaklah melibatkan rasa hormat dan kesetaraan.

Lebih lanjut, masing-masing dari kita men-*encode* dan men-*decode* informasi secara berbeda. Kita dapat memilih kata untuk merefleksikan arti yang kita sampaikan. Tetapi orang yang menerima informasi itu bisa saja menerjemahkan kata-kata kita untuk mengartikan sesuatu yang berbeda, sehingga

masing-masing *encode* dan *decode* informasi kita bergantung dalam suatu konteks (Sobur, 2012 : 34).

Abrar pun menuturkan bahwa trauma yang dialami oleh korban pun akhirnya juga diperburuk oleh situasi dalam masyarakat. Media massa turut memiliki pengaruh terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban karena pada kasus-kasus perkosaan, media massa juga memiliki peran penting untuk membentuk opini masyarakat tentang korban pemerkosaan itu sendiri. Oleh karena itu, baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut (Sulistyaningsih & Faturachman, 2002 : 14)

Ironisnya, banyak pemberitaan kasus pemerkosaan yang justru kembali memosisikan korban dalam runtutan perkosaan dengan mengulang kronologi kejadian secara rinci bahkan cenderung menyalahkan korban melalui diksi yang dia pilih. Perempuan dibingkai dalam posisi yang tidak berdaya, tidak punya kuasa atas tubuhnya sendiri, dan tidak bisa menolak atas perlakuan yang diterimanya. Jurnalisme berperspektif perempuan menganggap hal ini adalah permasalahan yang harus diluruskan dalam dunia jurnalisme.

Abrar & Subardjono pun mengemukakan bahwa pemberitaan yang tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran pun ditunjukkan dalam beberapa media massa, khususnya media online. Salah satu dari ketiganya bahkan merupakan Lembaga Pers Mahasiswa di UGM. Sedangkan dua lainnya adalah media nasional yang sudah lama terjun dalam bidang jurnalisme. Para wartawan cenderung menggunakan bahasa yang denotatif dan gamblang dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa perkosaan, seperti deskripsi, atau bahkan kronologi dari

peristiwa itu sendiri sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002 : 14)

Agni, mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual dibingkai dalam pemberitaan sebagai sosok perempuan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu untuk melawan. Gaya bahasa yang menjelaskan ‘perlakuan’ terhadap anggota tubuh yang diterima korban merangsang penerimaan yang justru menyudutkan dan merugikan korban itu sendiri. Dalam hal ini Balairung telah merepresentasikan perempuan korban kekerasan seksual sebagai seorang yang termarginalisasi hak anggota tubuhnya.

Berita tersebut mengungkap kronologi kejadian dengan detail yang menggiring pembaca untuk membayangkan peristiwa secara runtut dan memaksa pembaca untuk merasakan emosi berlebih dalam menyikapi pemerkosaan tersebut lewat kronologi yang diceritakan dalam pemberitaan. Berita ini memaksa pembaca untuk membayangkan kondisi korban ketika diperkosa.

Penggunaan bahasa yang menunjukkan indikasi dominasi patriarkis dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan malah mengaburkan makna dan tujuan dari berita itu dirumuskan. Keprihatinan yang seharusnya bisa ditanamkan pada kasus kekerasan terhadap perempuan malah menjadi kewajaran di mata umum karena salah dalam pengemasan dan penyampaian maksud. Dalam hal ini, Balairung tidak peka dan tidak ramah ketika memilih kata untuk dituliskan dalam beritanya. Misalnya, Balairung menggunakan pilihan kata ‘menyingkap baju’, ‘menyentuh dada’, ‘memasukkan jarinya pada kemaluan’ untuk menggambarkan detail kronologi kasus tersebut. Pilihan kata menggunakan kalimat

aktif ini menunjukkan kekuasaan pelaku atas korban. Lebih lanjut, pilihan kata tersebut dapat menimbulkan penyesatan yang berdampak buruk terhadap representasi perempuan di mata publik.

Perempuan korban kekerasan dianggap sebagai objek dengan penggambaran posisi yang pasif dan laki laki sebagai pelaku dianggap sebagai subyek yang bisa berperan aktif dan melakukan kata kerja terhadap obyek yang dikenainya. Editorial yang diterbitkan Balairung pun semakin mempertegas sikap Balairung dalam menanggapi kecaman dan struktur penulisan yang dipermasalahkan oleh pembaca mengenai kronologi kejadian yang ditulis dengan detail.

Di lain sisi, pemberitaan yang ditulis oleh media online nasional pun memberitakan Agni dengan mengalienasi korban sebagai sumber berita. Media online lain mengonsumsi dan menginterpretasikan kasus tersebut berdasar berita Balairungpress. Wawancara yang dikutip dan disertakan oleh VOA dan Tempo justru adalah pernyataan wawancara dari kuasa hukum pelaku. Kedua berita tersebut seolah olah mengalienasi atau mengasingkan korban dari pernyataannya dan mengarahkan opini pembaca agar korban juga harus merasa bertanggungjawab atas pilihannya untuk menginap di pondokan HS waktu itu. Dengan kata lain, VOA mengarahkan pembaca agar memiliki pendapat yang seragam seperti yang disuguhkan oleh teks berita VOA, bahwa HS, tidak bersalah atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Contohnya seperti menyantumkan pernyataan yang menggiring opini pembaca untuk mempertimbangkan kembali posisi Agni sebagai korban, seperti 'Malah yang mengaku korban ini yang nyuruh ngunci pintu'.

Tempo.co merilis pemberitaan dari sudut pandang pengacara HS dan HS sendiri sebagai pelaku. Sudut pandang yang tidak berimbang dan cenderung ‘membenarkan’ ini mengalienasi posisi korban dalam kasus tersebut. Hal ini terlihat dari kutipan, ‘..kenapa waktu itu nggak pulang saja, kan mau dianterin sama temen-temennya untuk balik. Kenapa harus masuk pondoknya Dika jam tiga pagi itu.’

Pemberitaan yang diproduksi oleh media lain yang menjadikan Balairung sebagai sumber beritanya pun mempertegas bahwa teks berita *blaming the victim* dalam Balairung membawa dampak yang luas untuk mempengaruhi opini publik. Berita Balairung tidak hanya dikonsumsi oleh pembaca saja, namun juga oleh media massa lain. Padahal, konten yang disajikan oleh Balairung merupakan bentuk objektifikasi seksual perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Jika teks ini dikonsumsi khalayak dalam jumlah besar dan lingkup luas, maka persepsi yang muncul mengenai perempuan di berita tersebut adalah perempuan tidak diposisikan sebagai korban, bahkan dianggap juga turut bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya karena dituduh ‘menyegajakan’ atau ‘menjadi penyebab’ dari adanya kejadian tersebut.

Kajian yang telah dilakukan Johnson (1993), Sanders (1993), Zoonen (1994), Siregar dan kolega (1999), Suryandaru (2002), Chambers dan kolega (2004), Sunarto, Santoso dan Dwiningtyas (2009), dan Sunarto (2010), menunjukkan bahwa institusi media massa masih didominasi oleh pekerja wanita baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, dominasi itu terlihat pada proporsi kerja pria dan wanita secara keseluruhan, serta penempatan dalam posisi-posisi strategis untuk pengambilan keputusan. Secara kualitatif, dominasi itu

terjadi melalui fenomena atap kaca (glass ceiling) yang menghambat mobilitas vertikal pekerja wanita. Situasi semacam ini jelas kurang menguntungkan bagi kaum wanita apabila kita mengingat berbagai fungsi yang bisa dijalankan oleh institusi media massa (Sunarto, 2013).

Patriarki sendiri bukan sistem yang terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa sosial. Sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang memberikan posisi dominan pada kaum laki-laki, menyebabkan kaum perempuan dianggap memiliki keterbelakangan dalam hal penentuan sikap dan pengambil keputusan. Berkaca dari sinilah, patriarki bisa dianggap bukan tanpa perencanaan, melainkan dibentuk oleh sistem sosial untuk melanggengkan kuasa laki-laki atas perempuan.

Permasalahan komunikasi massa didapati di media online mahasiswa UGM. Instutusi yang menjadi asal korban dan pelaku kekerasan seksual yang beritikad baik membuat pemberitaan yang menumbuhkan empati dengan dalih membela korban dan menempatkannya sebagai subjek yang bercerita, korban malah dibingkai dan direpresentasikan sebagai objek di media tersebut. Hal tidak wajar ini adalah permasalahan yang coba digali dalam penelitian ini.

Balairung sebagai sebuah institusi pers yang seharusnya mengedepankan keadilan dan kenyamanan bagi korban dalam pemberitaan, ternyata tidak memperlihatkan fungsinya sebagaimana mestinya.

1.2. Rumusan Masalah

Kasus kekerasan seksual di kampus menjadi kasus kekerasan yang sedang marak diperbincangkan oleh dunia akademis saat ini. Meski hingga saat ini belum ada data

komprehensif mengenai jumlah kejahatan seksual di lingkungan kampus (Utami, 2017:1), data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan, dalam ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan pelecehan seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Artinya, Indonesia berada dalam darurat kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup kampus. Ketidaksiapan dan lambannya penanganan kasus kekerasan seksual pada akhirnya mempertanyakan penegakan hukum dan kepercayaan universitas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat (Nurestri, 2018:1).

Ironisnya, pemberitaan soal kekerasan seksual justru mendelegitimasi atau mereduksi posisi sebagai korban perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Gaya bahasa yang menempatkan korban dalam posisi sebagai objek seksualitas dan pasif memperlihatkan bahwa sensitivitas gender belum dimiliki oleh Balairung dalam proses penyajian beritanya.

Pemberitaan semacam ini yang justru menimpakan kesalahan kepada korban berpotensi menambah trauma bagi korban dan menggiring masyarakat (dalam hal ini pembaca) untuk ikut menyalahkan korban, tanpa melihat variabel lain yang mungkin bisa dijadikan pemakluman atau pertimbangan korban ketika merespon seperti demikian. Sudut pandang *blaming the victim* pada berita pemerkosaan yang lolos ke media menjadi sudut pandang yang erat hubungannya dengan kebijakan redaksi. Penentuan berita apa saja yang akan dimunculkan dan

tidak dimunculkan menjadi kewenangan dari redaksi dan menjadi kebijakan yang disetujui sebagai pegangan bagi setiap awak media yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itulah, kebijakan redaksi menjadi dasar dari pertimbangan media untuk merumuskan dan meloloskan berita maupun elemen yang ada di dalam pemberitaan tersebut. Struktur dan alur keredaksian di dalamnya pula lah yang mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam media tersebut.

Kebijakan Balairung dalam menyeleksi isu dan menggunakan pilihan kata merepresentasikan keberpihakannya sebagai institusi media. Keberpihakan pada prinsip keadilan dan kebenaran dalam sudut pandang pemberitaan tidak ditonjolkan dalam berita ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menjelaskan

1. Bagaimana gambaran blaming the victim pada berita kekerasan seksual di Balairungpress.com?
2. Bagaimana kebijakan Balairungpress dan ideologi dominan dibaliknya terkait penayangan berita blaming the victim?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kekerasan simbolik berupa blaming the victim, khususnya objektifikasi korban kekerasan seksual di Balairungpress.com, (2) kebijakan Balairungpress.com terkait blaming the victim dan ideologi dominan dibalik kebijakan tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap penelitian sejenis di bidang analisis wacana kritis, khususnya bisa menjadi referensi dalam melakukan kajian atau studi kritis mengenai representasi korban kasus kekerasan seksual di media massa menggunakan analisis wacana Norman Fairclough.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini, khususnya di bidang Jurnalistik adalah untuk memberikan pandangan bagaimana suatu wacana bisa menjadi hal yang merepresentasikan nilai nilai yang akan ditanamkan dari redaksi untuk khalayak yang akan menjadi konsumen. Oleh karena itu, produsen berita, khususnya wartawan media online mampu mempertimbangkan dengan bijak aspek linguistik sebelum menulis pemberitaan.

1.4.3 Manfaat Sosial

Manfaat sosial dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi atau pencerdasan terhadap masyarakat awam bahwa ketimpangan relasi kuasa dan dominasi maskulinitas dalam menyikapi kasus kekerasan seksual adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan karena memiliki sudut pandang seperti ini tidak adil dalam penyelesaian masalah, tetapi masih banyak dari masyarakat yang melakukannya tanpa sadar. Fenomena victim blaming yang cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan seharusnya tidak lagi muncul

dalam penyikapan kasus kekerasan seksual, sehingga baik itu institusi pendidikan maupun masyarakat pada umumnya tidak lagi gagap dalam menangani kasus ini.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 State of The Art

1.5.1.1 Penelitian Niken Siregar (2015) : *Pemaknaan Peran Perempuan di Parlemen (Analisis Semiotika dalam Berita Online Tempo.co dan Kompas.com)*

Peneliti mengambil beberapa referensi dari karya ilmiah berupa skripsi dan tesis terdahulu untuk menjadi acuan dalam meneliti. Penelitian pertama yaitu penelitian skripsi dari Niken Siregar (2015) dengan judul “Pemaknaan Peran Perempuan di Parlemen (Analisis Semiotika dalam Berita Online Tempo.co dan Kompas.com)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat posisi perempuan yang ditampilkan melalui teks berita dari kedua portal berita tersebut dan menjelaskan ideologi dominan yang melatarbelakangi terjadinya penggambaran perempuan tersebut. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis semiotika dari Roland Barthes.

Penelitian Niken diambil sebagai salah satu referensi karena penelitian ini juga menggambarkan representasi perempuan dalam berita online. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, namun karena berada pada medium yang sama (media online) peneliti mengambil beberapa alur berpikir dari penelitian Niken. Perbedaan penelitian milik Niken Siregar dengan penelitian ini terdapat pada metodologi dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pembingkai korban yang didelegitimasi melalui berita online Balairung menggunakan analisis Norman Fairclough, sedangkan penelitian sebelumnya

memfokuskan pada analisis semiotik model Roland Barthes yang fokus perhatiannya tertuju pada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) dalam memahami representasi perempuan melalui sebuah tanda.

1.5.1.2. Penelitian Anna Puji Lestari (2018) : *Blaming the Victim : Kekerasan Simbolik Berupa Alienasi Gender Korban Pemerkosaan pada Berita Berita Asusila di Suaramerdeka.com*

Penelitian kedua adalah penelitian tesis dari Anna Puji Lestari (2018) dengan judul “Blaming the Victim : Kekerasan Simbolik Berupa Alienasi Gender Korban Pemerkosaan pada Berita Berita Asusila di Suaramerdeka.com”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekerasan simbolik berupa *blaming the victim*, mendeskripsikan *blaming the victim* berupa alienasi korban kekerasan seksual di suaramerdeka.com, mendeskripsikan kebijakan suaramerdeka.com terkait *blaming the victim*, dan mendeskripsikan beroperasinya ideologi dominan dibalik kebijakan suaramerdeka.com terkait *blaming the victim*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*critical discourse analysis / CDA*).

Peneliti mengambil penelitian dari Anna sebagai rujukan karena penelitian Anna memiliki asumsi yang sama dengan penelitian ini, yaitu adanya konsep *blaming the victim* dalam pemberitaan. Perbedaannya adalah, asumsi dari *blaming the victim* dalam penelitian Anna mengarah kepada alienasi, dimana korban perempuan diasingkan dan tidak disertakan sebagai informan atau sumber utama dalam menulis pemberitaan, sedangkan asumsi *blaming the victim* dari penelitian

ini mengarah kepada konsep sensualitas dan delegitimasi posisi perempuan (objektifikasi) sebagai korban.

1.5.1.3. Penelitian Sunarto (2007): *Kekerasan Televisi Terhadap Wanita: Studi Strukturasi Gender Industri Televisi Dalam Naturalisasi Kekerasan Terhadap Wanita Melalui Program Televisi Untuk Anak-anak di Indonesia.*

Penelitian tersebut mengkaji proses strukturasi media khususnya media televisi, yaitu dengan melihat bentuk-bentuk kekerasan, dominasi, gender, struktur gender dalam praktiknya di institusi media televisi, dan posisi kekerasan atas perempuan dalam proses strukturasi gender di media televisi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode Analisis Wacana Kritis dan kajian feminis, yang didukung dengan analisis isi feminis dan etnografi feminis. Hasil penelitian menyatakan, terdapat suatu proses naturalisasi kekerasan atas perempuan melalui program siaran televisi dengan melibatkan struktur gender agen perempuan dan struktur televisi serta struktur sosial di belakangnya yang bersifat resiprokal.

Penelitian Sunarto dijadikan sebagai salah satu dari rujukan karena sama-sama mengungkap bentuk kekerasan simbolik dan dominasi gender dalam struktur media. Yang membedakan penelitian Sunarto dengan penelitian ini adalah pada objek dan fokus penelitiannya. Jika penelitian Sunarto berfokus pada struktur yang ada dalam sebuah industri televisi dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis, penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan objektifikasi seksual yang menyebabkan pelemahan posisi korban oleh sebuah lembaga pers mahasiswa dalam menulis pemberitaan di media online-nya.

1.5.1.4. Penelitian Hapsari Dwiningtyas Sulistyani (2011) : “*Korban dan Kuasa di dalam Kajian Kekerasan terhadap Perempuan*”

Penelitian yang dilakukan Hapsari pada tahun 2011 ini merupakan studi gender tentang kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan cara perempuan korban dominasi kekuasaan patriarkal. Penelitian ini mulai melihat potensi perempuan dalam memperoleh kekuasaan dan menantang posisi mereka sebagai korban. Penelitian ini menunjukkan kemungkinan pergeseran perspektif dominan pada studi perempuan dengan cara menjelajahi tulisan perempuan. Menjelajahi tulisan perempuan merupakan salah satu cara mencari titik alternatif pandangan yang mampu menantang dominasi patriarki guna membangun peran sosial perempuan.

Penelitian yang dilakukan Hapsari dijadikan sebagai rujukan mengingat penelitian ini menunjukkan posisi perempuan dalam tatanan sosial, dimana perempuan terkungkung dalam dominasi patriarki ketika mereka mencoba berbicara soal kedudukan maupun kekuasaan. Yang menjadi pembeda adalah pada objek dan fokusnya, dimana penelitian Hapsari melibatkan tulisan perempuan sebagai objek yang diteliti secara langsung, sedangkan penelitian ini menggunakan teks berita dan wawancara dari media sebagai objek penelitian.

1.5.1.5. Penelitian Ikhsanti Syafaati (2016) : “*Pemaknaan Perempuan Asli Papua terhadap Berita Kekerasan pada Perempuan dalam Koran Radar Sorong*”

Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi gender dengan paradigma kritis menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Penelitian ini menunjukkan keberagaman resepsi perempuan asli Papua terhadap berita kekerasan terhadap perempuan di Papua yang dimuat dalam koran Radar Sorong. Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana media menggambarkan sosok perempuan Papua dalam berita kekerasan dan bagaimana media menggambarkannya menggunakan konteks lokal Papua.

Penelitian Ikhsanti dijadikan salah satu rujukan karena memiliki kesamaan dalam mengkritik relasi sosial yang timpang dalam masyarakat yang menggambarkan perempuan dalam sosok marginal. Perbedaan penelitian Ikhsanti dengan penelitian ini adalah dari segi metodologi dan fokus penelitian. Penelitian Ikhsanti mencoba mengungkap sebuah ideologi dominan di media, yaitu ideologi yang dimiliki oleh pemilik media yang masih bias budaya dengan memfokuskan pada pemaknaan yang diterima oleh perempuan dengan mengetahui kategorisasi pembaca. Sedangkan penelitian ini mengungkap ideologi dominan dibalik kebijakan penulisan berita *blaming the victim* yang terinternalisasi oleh budaya patriarki.

1.5.1.5. Penelitian Sunarto (2013) : “*Analisis Bingkai (Wanita sebagai Kelompok Minoritas pada Media Nasional dan Lokal tahun 2008-2012*”

Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi gender dengan paradigma kritis menggunakan analisis framing Gamson Modigliani. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam sebuah media (studi kasus dalam Kompas dan Suara Merdeka) bisa mempengaruhi kebijakan keredaksian dan mempengaruhi cara

menulis pemberitaan. Struktur organisasi yang memiliki relasi kuasa dan dominan laki-laki membuat perempuan ditampilkan secara tidak ramah dalam isu nasional maupun lokal selama kurun waktu 5 tahun.

Disertasi Sunarto dijadikan salah satu rujukan karena memiliki kesamaan dalam mengkritik relasi sosial yang timpang dalam masyarakat yang menggambarkan perempuan dalam sosok marginal, terlebih dalam sebuah institusi yang bernama media massa. Perbedaan penelitian Sunarto dengan penelitian ini adalah dari segi subjek penelitian. Penelitian Sunarto lebih memiliki banyak subjek dibanding penelitian ini. Penelitian Sunarto pun mengambil media cetak sebagai subjek yang diteliti, sedangkan penelitian ini mengambil media online sebagai subjek yang diteliti.

Sedangkan, yang menjadi pembeda antara penelitian *Blaming the Victim : Objektivikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Balairungpress* dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menyoroti bagaimana posisi korban kekerasan seksual digambarkan oleh pemberitaan media online menggunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Selain itu, penelitian ini mencoba mengungkap ideologi dominan dibalik kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga pers mahasiswa, institusi yang semestinya paham dengan moralitas, asas kepentingan publik, dan keadilan dalam pemberitaan, namun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh Balairung. Analisis model ini dipakai karena dinilai paling mampu untuk menjelaskan keberpihakan dan kebijakan media dari sisi diksi, tata bahasa, cara produksi dan konsumsi teks, penulis, hingga kondisi

sosial budaya. Analisis wacana kritis dengan subjek penelitian serupa belum pernah ditemukan di penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Alasan yang melandasi digunakannya paradigma kritis dalam penelitian ini adalah bahwa ketidakadilan gender menjadi hal yang turut diperjuangkan oleh paradigma ini. Severin (dalam Lestari, 2018 : 12) sendiri menekankan paradigma kritis bersumber pada struktur sosial yang lebih luas. Struktur sosial tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi massa sehingga paradigma kritis dapat berfokus untuk membedah siapa yang mengontrol suatu sistem komunikasi tersebut.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, konteks komunikasi massa yang terjadi adalah di berita online Balairungpress yang berfokus untuk mengontrol siapa yang berperan dibalik sistem pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media tersebut. Berita tersebut ingin membela korban dengan gaya pemberitaannya, namun disisi lain maksud yang ditangkap adalah berita tersebut malah meyalahkan korban. Hal yang tidak wajar itu coba digali dalam penelitian ini. Pemikiran paradigma kritis bersumber dari pemikiran Frankfurt. Paradigma kritis ini percaya ada kekuatan-kekuatan yang mengontrol proses komunikasi dalam masyarakat. Paradigma kritis memandang ada ketidakseimbangan di masyarakat, dan mengkritik sistem kekuasaan yang mendominasi dan menindas orang.

Paradigma kritis sendiri memiliki tiga tradisi, yaitu: Pertama, mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar dengan struktur kekuatan, keyakinan,

ataupun ideologi yang mendominasi dan pandangan tertentu di masyarakat yang menyajikan sebuah preferensi atau rujukan untuk memandang sesuatu. Kedua, mencoba membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan sebagai alat promosi emansipasi atau masyarakat yang lebih bebas dan berkecukupan. Usaha untuk memahami penindasan ini bermaksud untuk menghapus ilusi-ilusi ideologi dan menyikapi kekuatan-kekuatan yang menindas. Kemudian yang ketiga, tradisi ini menciptakan sebuah kesadaran untuk menciptakan hubungan antara teori dan tindakan. Teori-teori tersebut bersifat normatif dan bertindak untuk mendapatkan atau mencapai perubahan dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi masyarakat (Littlejohn dan Foss, 2011: 43-44)

1.5.3 Konstruksi Realita Media

Media telah menjadi sumber informasi yang dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran realitas mengenai suatu peristiwa. Realitas yang direfleksikan oleh media dapat dilihat dalam dua konsep. Pertama, konsep media secara aktif. Konsep ini melihat media sebagai partisipan yang ikut mengkonstruksi pesan yang memunculkan pandangan bahwa tidak ada realitas yang sesungguhnya dalam media. Kedua, konsep media secara pasif. Konsep ini memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan yang sesungguhnya, yaitu pesan-pesan sesuai fakta yang terjadi. Dalam hal ini, media diposisikan sebagai sarana yang netral serta menampilkan realitas apa adanya (Yusman, 2017: 18).

Konsep media secara aktif menjadi konsep yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini, media diposisikan bukan sebagai saluran yang bebas dan netral melainkan media dilihat sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas. Oleh karenanya, para pekerja, awak media yang terlibat dalam alur newsroom dan produksi berita yang terlibat dalam memproduksi pesan juga menyertakan pandangan, bias, bahkan keberpihakannya.

Dengan demikian, peristiwa yang sama akan sangat mungkin dikonstruksi secara berbeda karena wartawan bisa memiliki pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa. Teks berita yang diproduksinya bisa memperlihatkan bagaimana sebenarnya wartawan mengkonstruksikan peristiwa tersebut.

Karena bersifat '*construct*' atau 'konstruksi', ketika terjadi peliputan, baik itu ketika pemotretan, syuting, atau dalam proses penulisannya, sangat mungkin realitas dipahami atau dibangun berdasar ide-ide, nilai-nilai, atau hal yang diyakini kebenarannya untuk disampaikan oleh sang pembuat konstruksi tersebut. Hartley dalam bukunya "*Understanding News*" juga menegaskan bahwa berita memberikan konsep terhadap suatu realitas, karenanya berita tergantung dari hasil konstruksi manusia yang memiliki identitas dan karakteristik tertentu di lingkungannya (Hartley, 1982: 12).

Dalam pandangan konstruksi sosial, berita bukanlah suatu peristiwa atau fakta yang riil. Berita menjadi produk hasil interaksi antara wartawan dengan fakta. Fakta yang dimaknai oleh wartawan adalah konsepsi fakta yang diekspresikan dari internalisasi nilai yang dianutnya. Internalisasi nilai ini dapat timbul dari proses belajar sosial maupun lingkungan yang membentuk konsep diri wartawan tersebut.

Substansi dari teori konstruksi sosial media massa adalah pada persebaran informasi yang cepat serta luas. Persebaran ini memungkinkan berlangsungnya konstruksi sosial yang merata. Konstruksi dari realitas tersebut membentuk opini massa yang cenderung apriori dan sinis (Bungin 2006: 203). Proses framing akan membawa realitas menjadi bingkai dan makna yang dipersepsikan berbeda oleh media. Realitas sosial yang kompleks bisa jadi disajikan dalam suatu berita sederhana dan memenuhi logika tertentu.

Berita perlu dipahami bukan hanya sebagai informasi, namun juga penghasil makna. Makna itu sendiri merupakan hasil dari interaksi. Artinya, suatu berita baru belum dikatakan memiliki makna apabila belum sampai kepada khalayak dan belum dibaca. Bahkan ketika sudah proses cetak maupun rilis tetapi belum sampai ke tangan konsumen, berita tersebut belum memiliki makna apa-apa. Oleh karena itu, agar berita tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh khalayak, konteks sosial diperlukan untuk menerjemahkan makna dan menanggapi respon yang mungkin muncul dari pemberitaan tersebut.

Media juga cenderung akan menampilkan dan menonjolkan elemen tertentu. Walaupun didasarkan pada kejadian di dunia nyata, namun media akan membatasi dan menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, bahkan memberi porsi yang berbeda ketika muncul perspektif lain. Konsekuensi yang muncul setelahnya adalah pemaknaan atas suatu realitas yang tidak bisa kontrol. Mengapa? Karena pemaknaan tersebut akan bergantung pada sudut pandang, ideologi, maupun nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri produsen makna. Dan hal tersebut membawa suatu peristiwa bisa saja dimaknai

berbeda oleh media dan pembaca dalam berita yang sama, dan kita tidak bisa mendikte adanya penyeragaman makna yang harus muncul untuk menyikapi suatu realitas.

Posisi “konstruksi sosial media massa” sendiri bertujuan untuk mengorek substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas realitas”, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan “konstruksi sosial media massa” atas “konstruksi sosial atas realitas”. Namun, prosesnya pun digambarkan tidak muncul tiba-tiba, namun terbentuk melalui beberapa tahap. Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap : (1) menyiapkan materi konstruksi; (2) sebaran konstruksi; (3) pembentukan konstruksi; dan (4) tahap konfirmasi (Santoso, 2016 : 46).

1.5.4 Standpoint Theory (Teori Sikap)

Teori Standpoint adalah teori gender yang dirumuskan oleh Sandra Harding dan T.Wood. Standpoint theory menegaskan bahwa salah satu cara untuk mengetahui dunia adalah dengan melihat perspektif, posisi, viewpoint, atau outlook yang melekat pada diri seseorang (Griffin, 2012: 447). Dalam hal ini, salah satu caranya adalah memahami standpoint perempuan atau kaum marginal lainnya. Pengalaman dan pengetahuan kita, bagaimana kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain juga akan sangat dipengaruhi oleh kelompok sosial ketika kita berinteraksi.

Fokus teori standpoint ini adalah mengidentifikasi nilai kultural dan dinamika kekuasaan yang menyebabkan subordinasi gadis dan wanita, serta menggarisbawahi pengetahuan yang ditanamkan oleh aktivis yang biasanya adalah wanita. Teori ini mengajak untuk memperhatikan pengetahuan yang muncul dari kondisi dan pengalaman yang lazim dialami gadis dan wanita. Ringkasnya, individu menganut suatu sudut pandang ketika mereka (1) memahami sifat arbitrer dan tidak adil dari relasi kekuasaan yang mendasari struktur kehidupan sosial dan (2) kritis terhadap konsekuensi yang tidak adil dari relasi kekuasaan itu bagi anggota kelompok yang berbeda (Littlejohn dan Foss, 2016: 480).

Teori ini melihat perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih otonom, dapat mengambil kebijakan sendiri, sementara perempuan dianggap lebih suka membangun komunikasi dan hubungan interpersonal. Klasifikasi berdasar gender, kelas, maupun orientasi seksual ini dapat digunakan untuk mengamati dan meneliti jika perbedaan kelas sosial dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan pula dalam hubungan sosial.

Dalam konteks kekerasan seksual, teori standpoint menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Perkosaan sendiri hanya dapat terjadi saat perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dikelabui dan tidak berhak atas tubuhnya sendiri. Ketika tragedi pemerkosaan terjadi, perempuan seringkali disalahkan dan dibuat bersalah karena mereka tidak mampu menjaga tubuh dengan baik. Perkosaan selalu dihubungkan dengan rendahnya sistem penjagaan/perlindungan perempuan atas tubuhnya sendiri. Inilah wajah budaya patriarki yang cenderung memberi stigma pada kaum perempuan korban kekerasan.

Dalam hal ini, standpoint menjelaskan bahwa ideologi dominan laki-laki akan mempengaruhi konstruksi realita yang dibangun (Littlejohn dan Foss, 2016: 480).

1.5.5 Feminisme Radikal Kultural

Lorber (dalam Kusniati, 2016:1) menjelaskan dasar dari munculnya feminisme radikal adalah menggali akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan kuasa (power) antara perempuan dan laki-laki. Feminisme radikal berpendapat bahwa pembenahan sistem keadilan tidak bisa hanya diberlakukan dalam tatanan struktural dan reformasi hukum, namun juga harus dilakukan di tatanan kultural dan perempuanlah yang harus memulai perjuangan tersebut.

Suara laki-laki menentukan suara dunia dan kehidupan. Selama ini, di kancah politik, produksi ilmu pengetahuan, hingga dunia industri, suara perempuan kurang didengar atau bahkan tidak diperhitungkan. Singkat cerita, perempuan hingga kini dianggap menjadi obyek yang ditentukan sepihak oleh laki-laki. Alienasi perempuan menjadi hal yang tidak disadari. Alienasi tersebut mempersulit perempuan untuk berekspresi, menentukan, dan memberi arah bagi kehidupan mereka sendiri. Dalam aliran feminisme radikal, mendengarkan suara perempuan harus murni berasal dari perempuan dan tidak boleh dicampuri dengan pandangan seksis laki-laki.

Sumber ketidakadilan gender menurut aliran ini adalah ; (1) Sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki (sistem patriarki) yang selalu mendiskriminasi perempuan; (2) Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan; (3) Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum,

agama, dan lembaga lembaga sosial lainnya ; (4) Objektivikasi tubuh perempuan melalui iklan, media massa, dan produksi-produksi industri lainnya ; (5) Eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi.

Menurut Ferguson dalam (Tong, 2008 : 94) pandangan feminis radikal kultural mengenai seksualitas mengandung pemikiran sebagai berikut : (1) Hubungan heteroseksual, pada umumnya, dikarakterisasi dengan ideologi objektivikasi seksual (laki-laki sebagai subjek/tuan ; perempuan sebagai objek/budak), yang mendukung kekerasan seksual laki laki terhadap perempuan ; (2) Feminis harus meresistensi praktik seksual manapun yang mendukung atau menormalkan kekerasan seksual laki-laki ; (3) Sebagai feminis kita harus merebut kembali kendali atas seksualitas perempuan, dengan mengembangkan perhatian terhadap prioritas seksual kita sendiri, yang berbeda dari prioritas seksual laki-laki yaitu, yang lebih peduli terhadap keintiman daripada sekedar penampilan; (4) Hubungan seksual yang ideal adalah antara partner setara, yang samasama memberikan persetujuan, yang terlibat secara emosi dan tidak ikut ambil bagian dalam peran yang terpolariasikan.

1.5.6 Kekerasan Seksual

1.5.6.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual atau pelecehan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak sesuai dan/atau tidak wajar untuk tujuan tertentu.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang sulit diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya. Hal ini sering dikaitkan dengan konsep dari moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian serta kehormatan. Karena itulah, ketika perempuan mendapatkan perlakuan yang ‘mengusik’ kehormatan dan kesuciannya, seperti kekerasan seksual, dia akan dipandang menjadi aib. Pada akhirnya, korban pun sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual sehingga membuat korban seringkali bungkam dan enggan untuk mengungkapkan.

Komnas Perempuan mengumumkan 15 bentuk tindakan yang bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual, di antaranya : (1) Perkosaan; (2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.; (3) Pelecehan seksual; (4) Eksploitasi seksual; (5) Perdagangan perempuan demi tujuan seksual; (6) Prostitusi secara paksa, (7) Perbudakan seksual; (8) Pemaksaan pernikahan termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan kehamilan; (10) Pemaksaan aborsi; (11) Pemaksaan kontrasepsi serta sterilisasi; (12) Penyiksaan seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau bahkan mendiskriminasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan yang diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

1.5.6.2 Pemberitaan Kekerasan Seksual

Pola pikir masyarakat mengenai label yang dilekatkan pada perempuan korban pemerkosaan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan itu sendiri. Cara wartawan untuk menuliskan, menggambarkan,

bahkan mendeskripsikan korban ke dalam berita akan memberi perubahan bagi pola pikir pembaca. Semakin positif wartawan menuliskan perempuan korban pemerkosaan, maka masyarakat juga akan tergiring untuk berpikir positif. Sebaliknya, apabila wartawan menggambarkan perempuan korban pemerkosaan secara negatif, maka pola pikir yang terbentuk di masyarakat juga akan negatif terhadap korban. (Putri, 2012: 10). Jadi, jika ingin membawa representasi korban yang positif dan berdaya, seharusnya media tidak mengekspos hal-hal yang justru melemahkan posisi korban di mata pembaca. Misalnya seperti mengungkapkan keadaan korban ketika mendapati kekerasan, atau bahkan menegaskan bahwa korban diam saja. Kesimpulannya, apa yang tertulis di media (secara eksplisit) akan berbanding lurus dengan pola pikir masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam komunikasi perlu dilakukan agar masyarakat menjadi sadar gender. Banyak para praktisi media belum memiliki sensitivitas gender bahkan tidak sadar bahwa berita yang ditulis sebenarnya telah melanggar aturan atau kesetaraan gender yang telah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber Nomor 2 poin (b) mengenai verifikasi dan keberimbangan berita menjelaskan bahwa berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

1.6 Asumsi Penelitian

Balairungpress menggunakan bingkai *blaming the victim* dalam pemberitaannya. Kebijakan yang diambil olehnya tercermin dari pemberitaan yang menggunakan

diksi vulgar dan sensual serta menyalahkan korban melalui pernyataan narasumber. Selain itu, adanya editorial yang ditulis oleh Balairung dalam rangka mengklarifikasi pemberitaan yang menuai kontroversi setelahnya, semakin mempertegas bahwasanya kebijakan yang diambil media tersebut dalam menulis pemberitaan merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, kebenaran, dan kepentingan umum.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep *blaming the victim* adalah konstruksi negatif sosok perempuan di media massa. Hal ini terlihat dari kekerasan simbolik yang ditujukan pada korban kekerasan seksual (perempuan) yang terlihat dari pemberitaan di media.

Berita yang menceritakan secara detail dengan gaya bahasa yang menimbulkan daya imajinatif bagi pembaca adalah konsep berita yang justru “mendelegitimasi” posisi korban. Delegitimasi ini hadir dalam bentuk penyajian semiotika yang sarat akan pemilihan kata yang sensual dan memicu *visual sign* pembaca akan kronologis kejadian. Delegitimasi simbolik turut hadir dalam konsep penyingkiran pendapat korban sebagai narasumber dalam pemberitaan, dan pemilihan narasumber yang memiliki posisi kuasa dalam ranah hukum.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya orang-orang yang menyalahkan korban atas tindak kriminal yang dialaminya. Hal ini dikarenakan korban seringkali digambarkan secara salah sebagai individu yang pasif. Terlebih, korban pun dinilai bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya karena ketidakberdayaan atau keputusannya saat perkara berlangsung. Selain itu,

perempuan korban perkosaan juga telah dilanggar hak-haknya sebagai perempuan dan korban itu sendiri. Padahal, pelanggaran terhadap perempuan yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus dilindungi hak asasinya, otomatis merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum (Novitia, 2014: 18).

Masih banyak ditemui kasus pemerkosaan yang dibingkai oleh media massa sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki tidak normal yang tidak mampu mengontrol “nafsu birahi”-nya (Adam, 2018: 1). Padahal, tindakan kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh laki-laki “normal” yang tidak berpikir panjang mengenai tindakannya. Namun, media seolah-olah membingkai bahwa nafsu birahi laki-laki adalah hal naluriah yang tidak bisa dihindari dan perempuanlah yang seharusnya bisa mengontrol, antisipasi, bahkan adaptasi dengan “sifat” tersebut. Lebih lanjut, masyarakat pun ikut mendefinisikan laki-laki sebagai makhluk yang wajar saja apabila melakukan tindakan demikian disebabkan ketidaksanggupan mengendalikan nafsu. Sedangkan, perempuan sendiri didefinisikan sebagai pasif dan aseksual.

Hal ini diperparah dengan pemberitaan yang bias gender. Beberapa pernyataan korban dan pelaku kepada media massa pun turut menjadi bukti penguatnya. Korban dan pelaku pun mengalami miskonsepsi. Korban berpendapat bahwa ia sadar namun tidak mau berteriak karena takut banyak yang akan salah sangka perbuatan tersebut adalah perbuatan asusila, sedangkan pelaku berpikir bahwa ketika korban tidak melakukan penolakan, maka sah-sah saja bila pelaku melakukannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan menguji berbagai latar belakang sosial dan individu yang bermacam-macam. Peneliti kualitatif, paling tertarik pada bagaimana manusia mengatur dirinya dan latar sosial mereka dan bagaimana mereka memahami lingkungannya melalui simbol-simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial, dan sebagainya. Hasilnya, teknik kualitatif memungkinkan peneliti untuk berbagi pemahaman dan persepsi orang lain dan mengeksplor bagaimana manusia menyusun dan memberi makna bagi kehidupan sehari-hari. Peneliti dengan menggunakan teknik kualitatif ingin menguji bagaimana manusia belajar dan memahami tentang dirinya sendiri dan orang lain (Berg, 2001 : 7).

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain Analisis Wacana Kritis. Norman Fairclough (dalam Kristina, 2020 : 8) menjelaskan adanya dialektika atau pertentangan antara kenyataan sosial dan wacana. Dalam pandangan Fairclough, bahasa tutur dan bahasa tulis merupakan bentuk praktik sosial yang dilakukan oleh penulis dan petutur. Untuk memahami realitas di balik teks, diperlukan penelusuran terhadap konteks produksi teks, konsumsi teks dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi proses pembuatan teks. Fairclough juga menambahkan bahwa wacana juga mempengaruhi tatanan sosial, dan sebaliknya, tatanan sosial pun mempengaruhi wacana.

Dialektika yang dikemukakan Fairclough dapat ditelusuri melalui beberapa parameter. AWK versi Fairclough menitikberatkan pada tiga hal. Peneliti menganalisis wacana pada level teks beserta sejarah maupun konteks yang dapat membentuk wacana tersebut. Oleh karenanya, telaah penelitian ini tidak hanya pada level teks, namun juga dilanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu teks dihasilkan. Fairclough (1989 : 26) juga memperkenalkan tiga tahapan untuk mengeksplorasi sebuah wacana, yang terdiri dari analisis wacana (fase deskripsi), praktik analisis wacana (proses produksi teks, distribusi, dan penggunaan teks) yang sering disebut sebagai fase interpretasi, sedangkan analisis peristiwa diskursif lazim disebut explanation phase yang memotret praktik sosial budaya sebuah wacana.

Penelitian ini fokus pada kebijakan Balairungpress.com sebagai media mahasiswa menghasilkan berita *blaming the victim* sehingga pada level teks (mikro) akan dianalisis satu teks berita kekerasan seksual yang memiliki derajat *blaming the victim*. Selanjutnya, untuk mengetahui kebijakan internal redaksi di Balairungpress.com yang menghasilkan berita *blaming the victim* dilakukan analisis level meso (observasi dan wawancara dengan Pemimpin Umum sekaligus Penulis sebagai produsen makna dan pengambil kebijakan). Selain itu, di level meso juga dilakukan analisis praktik konsumsi teks oleh pembaca.

Di level makro, dilakukan analisis kebijakan eksternal terkait kultur dominan yang berlaku sehingga terbit berita *blaming the victim*. Bahasan ini akan memfokuskan pada aspek di luar media yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan isi media massa. Analisis sosio-kultural dalam penelitian ini akan lebih

menekankan pada aspek ideologi dominan yang menindas kaum perempuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial dan kultural yang mendominasi sehingga memengaruhi kebijakan redaksional penayangan berita *blaming the victim* di Balairungpress.com.

Relasi kekuasaan, pengaruh ideologi, dan cara-cara ketika ideologi melakukan konstruksi atas identitas sosial tertentu yang diasumsikan sebagai dasar kemunculan dan keberlangsungan wacana tertentu. Relasi kekuasaan yang mendasari adanya macam-macam wacana tertentu, pengaruh interaksi yang memungkinkan munculnya ideologi tersebut dan berpengaruh terhadap macam-macam wacana tertentu, serta cara-cara ketika ideologi melakukan konstruksi atas identitas sosial tertentu, nilai-nilai yang dikomunikasikan dan sebagainya dapat terbongkar melalui analisis sosio kultural. Ideologi sendiri sering menjadi pembungkus asumsi yang secara langsung maupun tidak langsung melegitimasi kekuasaan yang sudah ada.

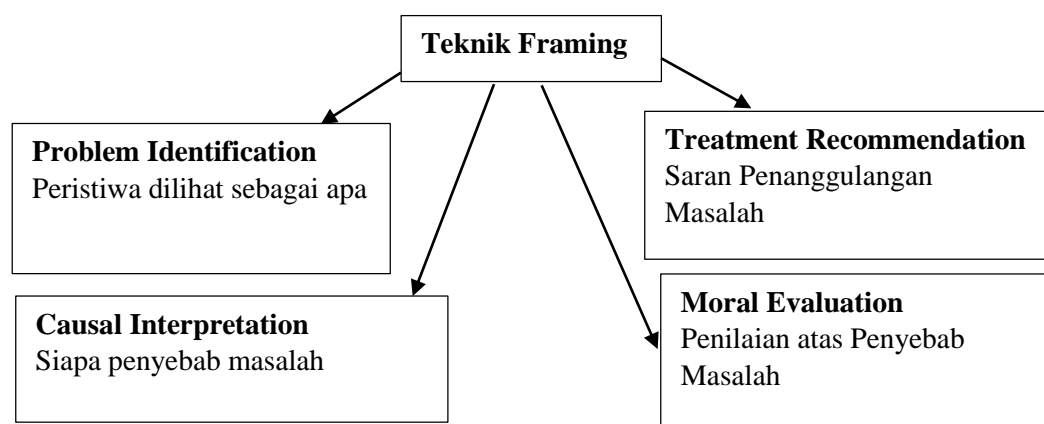
Analisis wacana CDA yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Norman Fairclough yang melihat teks (naskah) memiliki konteks. Wacana kritis dipandang sebagai sebuah proses mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu : (1) analisis teks, (2) analisis produksi teks, konsumsi, dan distribusi, dan (3) analisis sosial budaya peristiwa diskursif (baik melalui wawancara, makalah ilmiah, atau percakapan) keseluruhan (Fairclough, 1995 : 23).

CDA Norman Fairclough melihat teks sebagai produk yang melewati proses produksi dan produksi teks; dengan mempertimbangkan aspek institusional-situasional-sosial atau lazim disebut sebagai praktik sosio-kultural. Maka dari itu,

untuk memahami wacana (naskah/teks), kita tidak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di balik teks diperlukan penelusuran atas tiap detail interpretasi teks, analisis percakapan dan pragmatik, hubungan peristiwa diskursif dengan level wacana, dan motivasi apa praktik diskursif itu diambil. Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, untuk memahami wacana (naskah/teks) kita tidak dapat melepaskan dari konteksnya.

Proses pengumpulan data yang multilevel dalam CDA Fairclough dalam penelitian ini adalah : Pertama, pada level mikro yang dilakukan analisis teks dengan framing Entman. Teori framing menunjukkan bagaimana sebuah bingkai dapat termanifestasi atau tertanam dalam teks sehingga mempengaruhi pemikiran pembaca. Framing sendiri dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan kuasa suatu teks (media) sebagai bentuk komunikasi. Analisis framing ditujukan untuk mengidentifikasi dan memperjelas tendensi/kepentingan lewat bagian teks yang ada. Melalui framing juga, tendensi media dipahami secara lebih tepat dan berlaku universal (Entman, 1993 : 52)

Gambar 1.1 Skema Framing Robert Entman



Sumber : Alex Sobur dalam Analisis Teks Media (2012 : 173).

Menurut Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negative apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (Sobur, 2012 : 172).

Tahap Kedua, analisis Praktik Wacana Meso. Pada level ini dilakukan analisis pada praktik produksi dan konsumsi teks *blaming the victim*. Analisis paraktik produksi teks dilakukan melalui pengamatan dengan terlibat langsung pada produksi teks dan melakukan *indepth interview* dengan pengambil kebijakan redaksi (pimpinan) di Balairungpress.com (Pemimpin Umum sekaligus Penulis). Sedangkan analisis praktik konsumsi teks dilakukan dengan wawancara pada pembaca berita *blaming the victim* di Balairungpress.com. Analisis praktik konsumsi dilakukan dengan metode analisis resepsi. Analisis ini bertujuan untuk menghadirkan suatu ‘bacaan yang diistimewakan (*preferred reading*/pesan dan makna yang paling mungkin atau dominan) untuk konsumen (pemirsa, pendengar, atau pembaca). Pendekatan ini berupaya secara sistematis membongkar berbagai lapis makna dalam suatu teks yang membentuk ketidaksadaran individu konsumen (Ibrahim, 2007 : xxix).

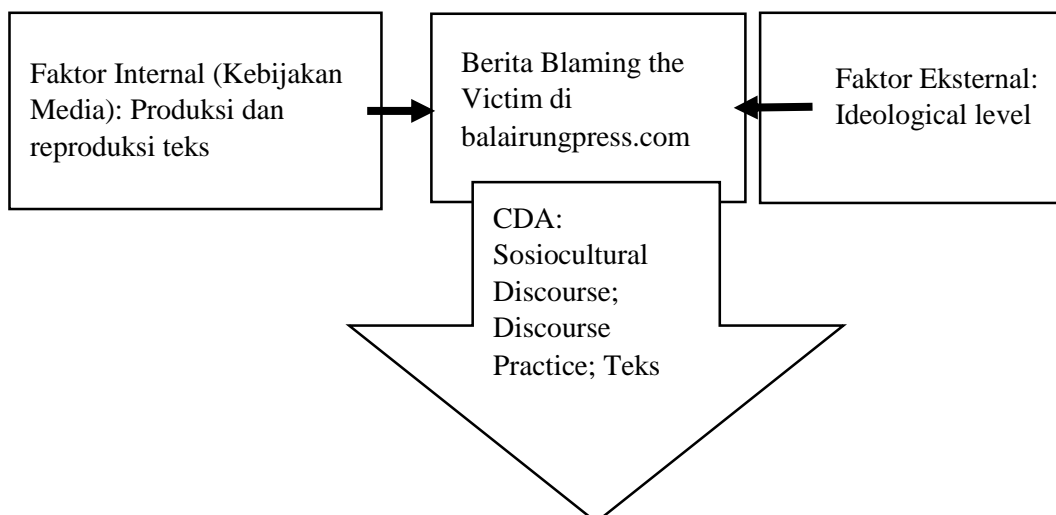
Tahap Ketiga, Analisis Makro (praktik sosio-kultural). Pada tahap ini, analisis dilakukan pada ideologi dominan yang membenarkan pelanggaran pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik. Pada tahap ini dilakukan pula analisis *secondary data*

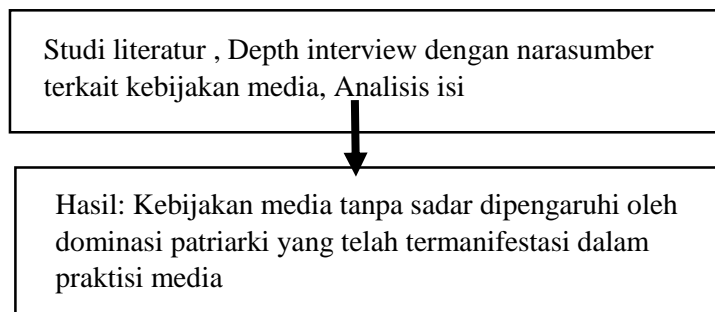
yang relevan dengan tema penelitian serta penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian. Praktik sosiokultural dalam analisis makro berhubungan dengan konteks luar teks. Konteks memasukkan banyak hal seperti konteks situasi, lebih jauh lagi konteks yang berhubungan dengan konteks institusi dan budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis sosio-kultural kaitannya dengan ideologi patriarki yang turut memengaruhi penayangan berita *blaming the victim* di Balairungpress.com. Pada level sosio-kultural teks dilihat dalam sebuah konteks yang melingkupinya dari kondisi sosial dan politik yang berlatar belakang historis.

Pada level makro, penelitian akan membuktikan bahwa media merepresentasikan kekuatan-kekuatan yang memengaruhinya. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi kekuatan ideologi dominan yang memengaruhi kebijakan internal berita *blaming the victim* di Balairungpress.com. Selain itu, penelitian dengan Analisis Wacana Kritis ini juga menunjukkan hubungan antara kekuasaan, ideologi, dan efek yang ditimbulkan oleh wacana. Adapun kerangka kerja penelitian yang akan dilakukan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Kerja Penelitian





1.8.2. Situs Penelitian

Untuk mendapatkan data, peneliti mengumpulkan dokumentasi berita kasus pemerkosaan Agni di media online Balairung Press yang dimuat di www.balairungpress.com/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan yang diunggah pada 5 november 2018 dan diakses pada 3 Februari 2019 pukul 07.30 WIB. Artikel tersebut ditulis oleh Citra Maudy, mahasiswi FISIPOL UGM dan disunting oleh Thovan Sugandi.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang menjadi sumber utama penulisan. Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan berupa teks-teks berita kekerasan seksual di Balairungpress.com untuk kemudian dianalisis dengan metode Framing Entman. Analisis framing Entman dimaksudkan untuk menunjukkan adanya praktik penulisan berita blaming the victim.

Robert N. Entman menyatakan bahwa framing atau membingkai berarti melibatkan seleksi (selection) dan menonjolkan beberapa aspek realitas (salient). Membingkai adalah proses memilih beberapa aspek realitas yang diputuskan dan membuatnya lebih menonjol dalam sebuah teks. Hal tersebut akan mengarahkan pada defined problems (pendefinisian masalah), diagnose cause (memperkirakan sumber masalah), moral evaluation (membuat suatu keputusan moral), dan treatment recommendation (menyarankan penyelesaian). Frame yang dibentuk biasanya akan mendiagnosis, mengevaluasi, dan menyisipkan sebuah poin (Entman, 1993 : 52).

Data sekunder merupakan referensi penunjang berupa dokumentasi berita dari ketiga media dan wawancara dengan penulis dari artikel Balairung untuk mendapatkan data pendukung penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk pengkajian, penelaahan, analisis masalah penelitian dan juga untuk pengembangan kerangka berpikir.

Secara keseluruhan jenis dan sumber data yang akan digunakan digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jenis dan Sumber Data Penelitian

Level	Jenis	Sumber Data
Mikro	Primer	Analisis framing berita blaming the victim dengan model Entman.
	Sekunder	Pedoman penulisan berita di Balairungpress
Meso	Primer	1) Wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di balairungpress.com (Pimpinan Umum sekaligus Penulisnya, serta Pemimpin Redaksi) 2) Wawancara dengan pembaca teks berita Balairungpress.com

	Sekunder	1) Dokumentasi pemberitaan di media online nasional yang mengonsumsi teks berita Balairung dan menjadikannya sebagai sumber beritanya. 2) Dokumentasi tertulis dan visual terkait sistem organisasi balairungpress.com (profil lembaga, peraturan lembaga, budaya organisasi, dan lain-lain yang relevan).
Makro	Primer	Analisis dominasi budaya patriarki dengan melihat acuan aturan yang digunakan keredaksian dalam menulis
	Sekunder	Dokumentasi kepustakaan dan data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian (komparasi tekstual berita terkait dengan artikel di 'koran kuning')

1.8.4 Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah teks berita kekerasan seksual UGM di Balairungpress.com yang dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*)

Tabel 1.2
Subjek Penelitian

Level	Jenis	Subjek Penelitian
Mikro	Primer	Teks berita di balairungpress.com dengan isu kekerasan seksual terkait blaming the victim yang terbit pada 5 November 2018.
	Sekunder	Panduan penulisan dalam Balairungpress
Meso	Primer	1) Wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di balairungpress.com (Pemimpin Umum sekaligus Penulis) 2) Wawancara dengan pembaca berita blaming the victim di balairungpress.com
	Sekunder	Analisis isi teks berita di media online yang mengonsumsi pemberitaan Balairung sebagai sumber beritanya
Makro	Primer	Analisis ideologi dominan yang membenarkan pelanggaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang relevan dengan fokus penelitian.

	Sekunder	Dokumentasi dan literatur lain yang relevan (arsip 'koran kuning' Pos Kota yang dibandingkan dengan teks berita Balairungpress.com)
--	----------	---

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendokumentasian isi komunikasi yang diteliti, dengan cara menyetik ulang, mengumpulkan dan meng-copy berita-berita kekerasan yang akan diriset.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis Norman Fairclough yang melibatkan tiga kerangka dimensi dalam penelitiannya (Text Analysis, Discourse Practice, and Sociocultural Practice). Analisis praktik wacana menitikberatkan perhatiannya pada proses produksi, konsumsi, dan konsumsi teks. Pemakaian bahasa dianggap sebagai sebuah proses artifisial dari praktik sosial dan lebih daripada sekedar aktivitas individu (Fairclough, 1995 : 9).

Fairclough juga menjelaskan bahwa analisis dilakukan secara tiga tahap. Dalam analisis pertama yaitu analisis teks. Analisis teks sering juga dimaknai sebagai analisis linguistik. Dalam hal ini, teks dilihat dengan melihat kosakata, semantik, serta tata kalimatnya. Pengertian/wacana juga dipahami dari koherensi dan kohesivitas, yaitu dengan mempertimbangkan kepaduan antar wacana dengan baik.

Analisis kedua, yaitu Discourse Practice, merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks/berita. Sebuah berita terbentuk dari pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan berita, kemudian diproduksi dengan cara-cara yang spesifik melalui rutinitas dan pola kerja wartawan di lapangan yang terstruktur serta spesifik, kemudian diolah kembali oleh editor untuk sentuhan finalnya. Untuk distribusi teks/berita, tergantung pada pola dan jenis teks, serta bagaimana sifat institusi melekat dalam berita tersebut.

Selanjutnya, dalam level discourse practice, wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan dengan Pemimpin Umum sekaligus Penulis mengenai kebijakan penayangan berita *blaming the victim* di Balairungpress.com. Kemudian, analisis ketiga, yaitu dalam praktik analisis sosio-kultural, konteks sosial di luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media. Konteks di sini dimaknai dengan konteks praktik institusi dan situasi dalam media itu sendiri. Praktik dari institusi tersebut berhubungan dengan politik, budaya, bahkan kondisi ekonomi tertentu dari awak media yang terlibat dalam produksi teks berita. Maka dari itu, ruang redaksi atau wartawan bukan profesi yang netral dan tidak ada kepentingan maupun ideologi. Produk yang dihasilkan oleh wartawan sangat ditentukan oleh faktor diluar dirinya. Praktik sosiokultural memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana produksi teks dapat dipahami dan ditelaah kekuatan apa yang melatarbelakangi adanya sebuah makna yang diproduksi dalam teks tersebut. Dalam studi ini, sebuah

teks *blaming the victim* dapat merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat.

Untuk level analisis dalam sosiokultural, Fairclough memaparkan tiga level, di antaranya : (1) Level Situasional yang memaparkan bagaimana teks diproduksi dengan memperhatikan aspek situasi ketika proses produksi berlangsung, seperti apakah teks berita dihasilkan dalam kondisi atau situasi yang khas dan unik; atukah teks berita diterbitkan pada waktu tertentu karena suatu desakan atau motif lain yang melatarbelakangi waktu terbitnya; (2) Level Institusional yang melihat bagaimana suatu institusi organisasi memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik produksi wacana yang dihasilkannya sendiri. Institusi ini dapat dimaknai bermacam-macam. Bisa berasal dari media itu sendiri, bisa juga berasal dari kekuatan di luar media yang ikut menentukan proses produksi suatu berita. Produksi berita sendiri tidak terlepas dari tiga permasalahan ekonomi media. Tiga permasalahan ini menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya wacana dalam pemberitaan. Pertama, pengiklan. Pengiklan menentukan kelangsungan hidup dari media itu sendiri. Kedua, tren atau selera dari khalayak pembaca yang mempengaruhi oplah atau penghasilan media. Semakin mampu media memenuhi kebutuhan dan selera yang diinginkan oleh khalayak, rating penikmatnya akan semakin tinggi. Rating tinggi adalah faktor yang sangat diperhatikan oleh media untuk memperoleh keuntungan atas produk beritanya. Kemudian, yang ketiga adalah persaingan antarmedia dalam menarik khalayak media itu sendiri. Kompetitor akan mempengaruhi level persaingan dalam menarik atensi khalayak; (3) Level Sosial yang menentukan perubahan masyarakat. Aspek ini lebih melihat

aspek makro secara keseluruhan seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem budaya masyarakat. Sistem –sistem tersebut diperlukan untuk dapat menentukan nilai-nilai dominan, siapa yang berkuasa, dan bagaimana kelompok penguasa tersebut mempengaruhi dan menentukan industri media.

Ideologi patriarki yang kental dalam masyarakat secara sadar maupun tidak sadar melihat perempuan sebagai kelas kedua dibawah laki-laki. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi isi pemberitaan media. Bahkan, perempuan secara tidak sadar dirinya sudah larut dalam dominasi tersebut dengan dalih membawa wacana perjuangan feminis yang mengakomodir naluriiah perempuan. Teknik analisis data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Teknik Analisis Data

Level	Jenis	Analisis Data
Mikro	Primer	Analisis teks berita blaming the victim dengan Framing Model Entman yang meliputi defined problems (pendefinisian masalah), diagnose cause (memperkirakan masalah atau sumber masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), suggest remedies (menekankan penyelesaian) yakni pengungkapan treatment yang diberikan media terhadap korban.
	Sekunder	Analisis data legal tentang panduan penulisan berita di Balairungpress.com
Meso	Primer	1) Wawancara dengan Pemimpin Umum Redaksi sekaligus Penulis berita “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” di Balairungpress.com 2) Analisis resepsi pembaca Balairungpress.com yang mengonsumsi teks pemberitaan
	Sekunder	1) Analisis konsumsi berita blaming the victim di Balairungpress.com oleh media online nasional, seperti VOA, Tempo, dan Kompas.com
Makro	Primer	Analisis kultur patriarki yang membenarkan pelanggaran pasal-pasal dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik pada berita <i>blaming the victim</i> .

	Sekunder	<p>1) Analisis kualitatif kebijakan melalui dokumentasi kepustakaan mengenai artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teks berita Balairung akan dikomparasikan dengan artikel dari ‘koran kuning’ yang juga membahas tentang kekerasan seksual</p> <p>2) Analisis sosio-budaya diharapkan mampu membongkar relasi kekuasaan yang mendasari kemunculan dan keberlangsungan wacana tertentu, pengaruh ideologi yang mungkin terjadi pada wacana tersebut.</p>
--	----------	---

1.9 Goodness Criteria

Pada penelitian ini, untuk mengukur goodness of quality maka diajukan historical situadness, yaitu tidak mengabaikan konteks historis, politik-ekonomi serta sosial-budaya yang melatarbelakangi. Goodness criteria yang mewakili kredibilitas penelitian ini adalah penempatan historical situadness sebagai bagian dari upaya untuk menjelaskan struktur ideologi dalam industri media yang memengaruhi kebijakan industri media dalam proses penayangan berita blaming the victim.

1.10 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi metodologi yang digunakan. Sebagai penelitian dalam kerangka tradisi kritis, penelitian ini meniadakan interpretasi atau pengalaman sadar individu yang menjalani aktivitas rutin bekerja di perusahaan media massa.